

MAARIF

ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL

Menyoal Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi



AHMAD SYAFII MAARIF | AHMAD FUAD FANANI | DONNY GAHRAL ADIAN
FRANZ MAGNIS-SUSENO | HARYATMOKO | NAFI MUTHOHIRIN
R. SITI ZUHRO | YUDI LATIF | ZULY QODIR

Pengantar Redaksi

Menyoal Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi: Sebuah Pengantar	4
<i>Ahmad Fuad Fanani</i>	

Artikel Utama

Demokrasi Sosial, Moralitas Publik, dan Pembelaan terhadap Rakyat Kecil (Sebuah Haluan Utama Politik)....	12
<i>Ahmad Syafii Maarif</i>	
Memantapkan Harkat Moral Perpolitikan Indonesia	24
<i>Franz Magnis-Suseno</i>	
Etika Politik dan Pembaharuan Budaya Politik	38
<i>Haryatmoko</i>	
Musyawah (Untuk) Mufakat	59
<i>Donny Gahral Adian</i>	
Moral Pancasila sebagai Kunci Kemajuan Bangsa	67
<i>Yudi Latif</i>	
Membaca Praktek Demokrasi dan Peran Aktor di Daerah.....	77
<i>R. Siti Zuhro</i>	
Intoleransi Agama dan Kejahatan Politik di Indoneisa ...	95
<i>Zuly Qodir</i>	

Riset

Mahasiswa di Pusaran Fundamentalisme Islam: Studi Kasus di Universitas Indonesia	109
<i>Nafi Muthohirin</i>	
Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia: Sejarah, Doktrin, dan Praktek Dalam Masyarakat Muslim.....	137
<i>Ahmad Fuad Fanani</i>	

Khazanah Lokal

Inspirasi Kemandirian Habib Ali	157
<i>Dadiw Krisna Alka</i>	

Pustaka

Pancasila dan Narasi Praktik Keteladanan	170
<i>Wahyudi Akmaliah</i>	
Profil Penulis.....	183
Profil MAARIF Institute dan Profil Media	190
Petunjuk dan Format Penulisan Artikel	199

MEMANTAPKAN HARKAT MORAL PERPOLITIKAN INDONESIA

Franz Magnis-Suseno

Tekad etis

Apa itu Indonesia? Jawaban tidak cukup kalau hanya memandang peta bumi dari Sabang ke Merauke atau dengan mencari data dari kantor statistik. Apa itu Indonesia kita ketahui dari sejarah Indonesia. Karena itu begitu penting generasi muda Indonesia selalu menjadi akrab dengan sejarah bangsa. Unsur yang hakiki dalam sejarah Indonesia adalah bahwa Indonesia mendapat identitas dan eksistensinya dari suatu dorongan etis.

Bangsa Indonesia bukan bangsa alami. Berbeda dengan di Korea atau Polandia, di Nusantara tidak hanya ada satu bahasa, melainkan ratusan bahasa yang berakar dalam budaya masing-masing. Tak ada satu wilayah kompak yang secara alami cenderung menjadi satu negara. Dari sudut geografi tak ada alasan mengapa ribuan pulau di Nusantara harus bersatu sebagai Indonesia. Dari sudut bahasa, etnik, budaya dan agama para penghuni pulau-pulau itu amat majemuk. Masyarakat-masyarakat Nusantara dengan pelbagai budaya itu telah menjadi satu negara karena *mau* membentuk satu negara, Indonesia. Mereka menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, karena mereka *mau* bersatu dan mereka mau bersatu karena merasa sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sukarno sudah menegaskan hal itu dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Kemauan itu tumbuh karena suatu pengalaman bersama yaitu bahwa orang-orang penghuni Nusantara bersama-sama mengalami

ketertindasan, ketidakberdayaan terhadap penjajah dari negara kecil di kejauhan, bersama-sama mereka merasa terhina karena diperlakukan sebagai anak kecil yang perlu bimbingan orangtua, tapi di mana bimbingan itu sebenarnya hanyalah kedok bagi penghisapan dan pencurian kekayaannya. Berhadapan dengan penjajahan itu rakyat di Nusantara semakin merasa bersatu. Hingga 1928 pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara bertemu di Jakarta—yang waktu itu masih bernama Batavia—dan bersumpah; „bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.“ Pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia lahir.

Perjuangan para pemuda nasionalis Indonesia itu bukan hanya untuk memerdekakan Indonesia, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan. Keadilan begitu sentral bagi para bapak bangsa karena mereka mengalami penjajahan, yang pada hakekatnya penjajahan sebagai situasi yang tidak adil. Rakyat Indonesia bukan saja dirampas kemerdekaannya, melainkan dihisap, menjadi orang-orang yang harus melayani kerakusan bangsa lain. Oleh karena itu, Kemerdekaan Indonesia hakikatnya dicita-citakan untuk membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Para pendiri bangsa juga sadar bahwa tujuan itu tidak akan tercapai secara otomatis. Sukarnolah yang mengkhawatirkan—jangan sampai—sesudah bangsa Indonesia melampaui jembatan emas kemerdekaan, negara jatuh ke tangan kaum feodal dan kapitalis.

Undang-undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan fokus pada keadilan itu. Dalam Pembukaan, hanya kata *Keadilan* yang muncul dua kali (tiga kali kalau sila kedua dihitung juga). Kedaulatan dinyatakan „adalah di tangan rakyat“. Pasal 31, 33 dan 34 bertujuan membuat nyata bahwa seluruh rakyat mendapat keadilan dan kemajuan bersama.

Pernyataan paling mendasar bahwa Indonesia secara hakiki merupakan kesatuan yang bermoral adalah Pancasila. Lima sila Pancasila merupakan cita-cita luhur, nilai-nilai dasar dan tolok-ukur bagi etis-tidaknya perpolitikan Indonesia. Para wakil bangsa Indonesia menegaskan bahwa „kemerdekaan kebangsaan Indonesia“ „disusunlah“ untuk „melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia“. Pernyataan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 itu amat

penting karena menegaskan bahwa „segenap bangsa Indonesia“ dan „seluruh tumpah darah Indonesia“ harus dilindungi, jadi tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada mayoritas dan minoritas dalam kedudukan sebagai warga negara dan manusia. Di mana hanya mereka yang banyak benar dan yang sedikit tidak benar. Kesepakatan itu dijamin dengan mendasarkan Republik Indonesia pada lima prinsip, yaitu lima sila Pancasila: Bahwa tak ada saudara dan saudari yang diperlakukan berbeda karena keyakinan agamanya, bahwa semua masalah akan dipecahkan secara adil dan beradab dan bukan dengan paksaan kekerasan dan berdasarkan kebencian, bahwa semua mau bersatu dalam menjunjung tinggi Indonesia yang satu, bahwa pemerintahan betul-betul ditentukan oleh rakyat dan bukan oleh macam-macam elit, serta bahwa pendidikan, pembangunan, perekonomian dan seluruh kebijakan politik harus menguntungkan seluruh rakyat dan bukan hanya mereka yang punya akses ke kekuasaan. Sejarah kelahiran Indonesia dan pembukaan undang-undang dasar 1945 memperlihatkan bahwa eksistensi Indonesia berdasarkan suatu tekad etis.

Kenyataan ternyata lain

Ternyata, meskipun tekad etis itu tak pernah hilang, ia tidak mempertahankan diri secara konsekuen. Tidak perlu di sini berspekulasi apa latar belakang kegagalan itu. Banyak negara muda lain mengalami hal yang sama, termasuk negara kelahiran penulis. Tetapi 69 tahun seluruh Indonesia diproklamasikan kita harus berani memandang dengan terbuka apa yang meleset sedemikian mengerikan dalam sejarah bangsa dari cita-cita luhur pada permulaannya.

Belum setahun, dan di tengah-tengah perang melawan Belanda yang berusaha untuk merebut kembali kekuasaannya sebagai penjajah, para tokoh Indonesia dan kakitangan mereka mulai saling mengancam, saling menculik, saling membunuh. Seorang tokoh nasional sehebat Tan Malaka ditembak *bak anjing* oleh bangsa sendiri. Peristiwa Madiun bukan hanya sebuah pemberontakan, melainkan darah yang dicurahkan tanpa perlu sebenarnya, bahkan hingga sekarang pun masih mengejutkan. Kemudian ada pelbagai pemberontakan. 14 tahun pertama Republik yang demokratis diakhiri 1959 dan dimulai tradisi baru. Tokoh-tokoh bangsa yang dianggap sebagai lawan ditahan.

Penghapusan demokrasi dan penggantinya dengan kekuasaan penuh di tangan presiden Sukarno dalam waktu hanya enam tahun membawa bangsa Indonesia ke suatu malapetaka nasional yang sulit dibayangkan sebelumnya. Percobaan makar suatu gerakan yang menamakan diri Gerakan Tiga puluh September berakhir dalam salah satu *masaker* paling buruk pada umat manusia segala zaman. Suatu celah kultural—celah antara abangan dan santri—yang sejak dari pertengahan tahun 1800-an semakin menjadi pertentangan, mecuat menjadi konflik habis-habisan sesudah diisi dengan bobot ideologis.

Akhirnya Gerakan 30 September membobol bendungan yang masih menahan rasa saling takut, benci dan keinginan membalas. Sehingga, tidak tanpa manipulasi berkepentingan politik, bangsa Indonesia membunuh bangsa Indonesia secara besar-besaran. Lawan politik dan saingan kultural menjadi musuh yang harus dikucilkan, dihancurkan, disingkirkan, dicap sebagai penjelemaan segala yang jahat, maka dihabisi dan dibunuh. Kejadian itu meninggalkan trauma mendalam dalam jiwa bangsa Indonesia yang sampai hari ini belum dapat diangkat ke kesadaran publik. Kesadaran bahwa pembunuhan-pembunuhan terhadap apa yang disebut "komunis" merupakan suatu kejahatan di luar segala proporsi. Kesediaan untuk mengakui para korban sebagai korban baru mulai di sana-sini. Padahal bangsa Indonesia tidak akan mencapai kedamaian batin sejati selama peristiwa yang sudah hampir 50 tahun lalu terjadi tetap ditutup-tutupi.

Orde Baru lahir dari tindakan kekerasan, penindasan dan kejahatan di luar segala ukuran itu. Maka tidak mengherankan bahwa di masa Orde Baru sewaktu-waktu muncul kekerasan, kekerasan yang mengancam mereka yang dianggap lawan. Kita ingat Kedung Ombo di pertengahan tahun 1980-an, di mana 5268 keluarga harus menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan bendungan—sesuatu yang secara teknologis masuk akal—dan waktu mereka memprotes kecilnya ganti rugi—600 keluarga menolak pindah karena daripada Rp. 3.000/m² mereka hanya menerima Rp. 250 karena uang ganti rugi yang diberikan oleh Bank Dunia sudah habis dikorupsikan—mereka lalu dituduh komunis!. Di tahun 80-an abad lalu sekitar seribu "preman" dibunuh begitu saja oleh aparat tertentu di malam hari, dalam suatu operasi penembakan misterius ("petrus").

Di zaman Suharto memang tidak semua lawan dibunuh dan pembunuhan

politik di masa Orde Baru tidak pernah menjadi biasa seperti halnya misalnya di Argentina di tahun 70-an. Akan tetapi para penandatangan Petisi 50 dikucilkan dan dicekik secara ekonomis. Akhir pemerintahan Suharto kekerasan semakin muncul. Konflik berdarah Dayak-Melayu dengan Madura di Kalimantan Barat, pembakaran besar-besaran terhadap gereja-gereja di beberapa kota, lalu awal 1998 penculikan-penculikan terhadap aktivis oposan, di mana 12 orang tidak kembali—jadi pasti mati di bawah siksaan—dan akhirnya huru-hara di Jakarta, Solo dan lain tempat di pertengahan 1998 dengan banyak orang yang mati memperlihatkan betapa kehidupan bangsa masih penuh kekerasan.

Reformasi

Di masa pasca-Suharto kekerasan tetap ada. Tiga konflik paling serius adalah konflik Madura-Dayak di Sampit dan konflik Kristen-Islam di Maluku dan di Poso dan sekitarnya. Ada juga konflik tanah, misalnya di Jawa tanah perkebunan diambil alih paksa oleh petani yang merasa puluhan tahun lalu dipaksa untuk melepaskannya. Konflik tanah, konflik antar etnik, konflik antara pendatang dan penduduk asli potensial cukup berbahaya. Dalam masyarakat, misalnya masyarakat Jakarta, gesekan dan konflik sederhana cenderung menjadi konflik kekerasan. Konflik-konflik itu endemis dalam masyarakat dan berakar dalam budaya. Kekerasan seperti ini masih biasa dan tinggal rangsangan sedikit untuk pecah.

Namun ada juga perkembangan-perkembangan yang menjanjikan perubahan. Misalnya Habibie yang waktu menjadi pengganti Suharto sebagai Presiden R. I. dicurigai akan menyelamatkan sistem kekuasaan Orde Baru. Tetapi Beliau membebaskan para tahanan politik, menghapus penghalang kebebasan-kebebasan demokratis, khususnya kebebasan menyatakan pendapat, mengizinkan pembentukan partai politik baru, memungkinkan pemilihan umum sebelum waktunya meskipun tahu bahwa itu akan mengancam kekuasaannya. Sebagai Ketua ICMI dan dengan kabinet di mana ada tokoh-tokoh ICMI ia mengadakan kebijakan politik yang sedikit pun tidak diskriminatif, dan akhirnya—ada yang belum memaafkannya—ia memberi kepada rakyat Timor Leste kesempatan untuk menyatakan kehendak mereka. Cocok dengan sikap *noblesse oblige* itu, bahwa ia sendiri melepaskan jabatannya secara elegan waktu tidak mendapat kepercayaan MPR.

Pada saat yang sama MPR di bawah ketuanya Amien Rais memastikan bahwa pokok-pokok kekuasaan demokratis betul-betul ditanamkan dalam undang-undang dasar kita serta, teramat penting, MPR memasukkan jaminan terpenting moralitas politik ke dalamnya yaitu hak-hak asasi manusia. Kita akhirnya memperoleh kembali pemerintahan demokratis di mana negara pada prinsipnya tidak lagi melakukan paksaan dan kekerasan terhadap rakyatnya. Di mana, lagi-lagi pada prinsipnya—karena kenyataan belum sebegitu—konflik dan perselisihan tidak dipecahkan dengan *dhawuh* penguasa atau langsung dengan kekerasan, melainkan dengan musyawarah, dan kalau tak berhasil, dengan jalan hukum. Dalam arti ini kehidupan politik Indonesia jelas menjadi lebih bermoral.

Tantangan-tantangan baru

(1) Keambrukan Toleransi Tradisional

Bangsa Indonesia pernah mampu hidup bersama dalam damai, meskipun tak pernah dalam damai sempurna, tapi selalu ada konflik-konflik. Kemampuan itu semakin ambruk. Kesediaan untuk saling menerima—itulah dasar bangsa yang *bhinneka tunggal ika*—digerogoti oleh rasa saling mengiri, saling benci, untuk menolak mereka yang berbeda dari kita. Konflik dan kekerasan ada di mana-mana: tawuran sadis pelajar tanpa sesal, perang antar kampung di Jakarta tanpa latar belakang etnik atau agama (rebutan narkoba), dan konflik tanah. Di daerah konflik antara etnik, konflik menjadi lebih gawat kalau identitas etnik juga termasuk identitas agama, apalagi kalau yang satu penduduk asli dan yang lain pendatang dan seterusnya. Di Indonesia bukan disintegrasi bangsa yang menjadi ancaman—sebagaimana dikawatirkan sesudah Orde Baru ambruk—melainkan konflik dan kekerasan antar tetangga. Peran *money politics* dalam perpolitikan membuat pilkada menjadi pemicu kekerasan nomor satu.

(2) Budaya Konsumisme Hedonistik

Ancaman kedua bersumber pada konsumerisme kapitalistik yang melanda kita. Kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri dengan terus menerus menciptakan kebutuhan baru. Secara sederhana, kapitalisme harus membuat orang merasa membutuhkan sesuatu yang sebelumnya, bahkan sebenarnya, tidak dibutuhkannya. Itu dikerjakannya melalui promosi. Promosi membuat orang merasa *minder* apabila ia tidak memiliki produk terbaru. Kemampuan untuk berkonsumsi baginya menjadi bukti

bahwa ia adalah orang yang diakui. Maka konsumsi menjadi tujuan hidup. Konsumsi sebagaimana didefinisikan oleh iklan/promosi dan lain sebagainya. Dan dorongan untuk berkonsumsi tidak pernah habis karena selalu ada komoditi baru yang dilemparkan ke pasar. Orang mengukur nilai hidupnya, harga diri dan identitasnya dari kemampuan untuk konsumsi, tidak untuk memenuhi kebutuhan/keinginan tertentu, melainkan konsumsi demi konsumsi. *Shopping* sebagai gaya hidup. Di kota lebih besar *mall-mall* menarik *the golden crowd*. Tapi orang kecil pun mau kelihatan *trendy* dan mengalami krisis identitas kalau tidak dapat membeli *gadget* paling mutakhir.

Mengapa budaya konsumistik itu menjadi masalah etis? Karena dorongan atau kecanduan untuk terus memperluas konsumsi menyingkirkan perhatian terhadap mereka yang masih miskin, terhadap cita-cita nasional dan rasa bangga kalau ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Konsumerisme mematikan solidaritas dalam masyarakat karena hidup semakin berfokus pada diri sendiri. Perpolitikan lantas tidak lagi dilihat sebagai perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa yang maju bersama, melainkan sebagai medan daripada saya mencoba menarik keuntungan sebesar mungkin.

(3) Keambrokan Solidaritas Bangsa

Perspektif “apa yang saya peroleh dari negara saya” itu mengarah ke keambrokan solidaritas bangsa. Kalau fokus kita masing-masing pada kita sendiri saja, solidaritas dengan mereka dalam bangsa kita yang dalam keadaan susah, miskin dan lemah menguap. Seakan-akan tak ada waktu untuk memikirkannya. Apalagi kita bisa hidup tanpa mereka. Bangsa Indonesia berada dalam bahaya perpecahan vertikal. 40 persen bangsa Indonesia mengalami kemajuan terus dalam tingkat hidup dan kesejahteraan. Itu perlu disyukuri. Akan tetapi ada 60% belum sejahtera, dan itu terjadi 68 tahun sesudah proklamasi. Sekitar 28 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lain, kekayaan luar biasa bertumpuk-tumpuk. Salah satu contoh serius adalah kenyataan bahwa pemerintah-pemerintah pasca-reformasi belum berbuat apa pun bagi kurang lebih 48% masyarakat yang hidup dari pertanian—itu juga aneh, sementara sudah lama diketahui bahwa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan mengalami kemajuan ekonomis luar biasa karena mereka menyetatkan dulu sektor pertanian. Tapi kita ini tetap feodal dan petani tidak dianggap. Perpolitikan yang tidak terus

menerus berfokus pada warga bangsa yang paling memerlukan solidaritas karena belum dapat hidup secara manusiawi menjadi busuk.

(4) Ekstremisme Keagamaan

Intoleransi tersebut di atas yang terus bertambah "secara alami" karena tekanan hidup sehari-hari dan lain sebagainya, diperkuat dan didorong oleh kelompok-kelompok agamis yang memang mau membongkar *bhinneka tunggal ika* dan menggantikannya dengan rezim totaliter agamis menurut ideologi-ideologi mereka yang impor-transnasional. Ada yang meremehkan budaya tradisional, ada yang menolak paham kebangsaan. Padahal orang yang tidak lagi dapat menghayati nilai-nilai kebangsaannya serta menolak nilai-nilai budaya tradisional atas nama ideologi juga tidak akan mampu untuk menghayati nilai-nilai kultural serta nilai-nilai kemanusiaan. Kelompok orang-orang yang menolak kemanusiaan dan tradisi-tradisi budaya sudah menjadi totaliter secara mental karena tidak mengakui mereka yang berbeda, dan dari mental totaliter hanya ada langkah kecil ke mental teroris yang bersedia membunuh.

Yang mengkhawatirkan adalah bahwa ekstremisme ideologis diberitakan justru meluas di kalangan mahasiswa di universitas-universitas negeri, artinya ini terjadi diantara calon kelas intelektual bangsa. Gawat, kalau universitas-universitas kita melahirkan orang-orang fanatik yang secara prinsip tidak toleran dan menganggap rendah semua yang tidak sama dengan mereka. Bahwa negara lemah dalam melindungi minoritas-minoritas dan nihil dalam melindungi apa yang dicap "ajaran sesat" amat memalukan. Bukti ancaman terhadap moralitas perpolitikan kita adalah bahwa negara tidak lagi berani menjamin bahwa segenap warga bangsa, juga kalau tidak termasuk enam agama "yang diakui", menikmati semua hak sebagai warga negara.

(5) Korupsi

Tentang korupsi tidak perlu bicara panjang lebar. Sudah terlalu jelas bahwa korupsi merupakan ancaman paling besar yang dihadapi negara kita sekarang. Soalnya, korupsi menggerogoti substansi kebangsaan kita: Substansi moral, substansi sosial, kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Korupsi membuat kita dari atas sampai ke bawah menjadi orang yang tidak jujur. Itu fatal. Orang yang tidak jujur tidak lagi tahu apa itu keadilan. Ia tidak tahu apa arti tanggungjawab. Dan ia tidak lagi meminati mutu outputnya. Karena itu kompetensi-kompetensi

yang barangkali dimiliki menjadi tidak efektif karena bukan kualitas outputnya, melainkan keuntungan pribadi yang menjadi motivasinya. Aparat negara tidak memilih kebijakan yang paling menguntungkan masyarakat, melainkan yang paling menguntungkan politisi dan aparat sendiri. Kalau kita tidak berhasil memberantas korupsi, bangsa kita akan gagal. Korupsi paling berbahaya adalah korupsi di kelas politik negara kita. Ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi karena korupsi menunjuk ke situasi yang sudah merupakan malapetaka. Bagaimana demokrasi kita dapat survive, kalau misalnya sebagian besar anggota DPR adalah orang kriminal yang tempatnya seharusnya di penjara?

Karena lima tantangan itu mengancam harkat moral bangsa Indonesia, situasi di negara kita betul-betul gawat. Kalau kita mau ke luar dari situasi itu, kita harus kembali ke dasar moral di atasnya bangsa Indonesia mendirikan negaranya yang sekaligus adalah syarat bahwa bangsa Indonesia yang majemuk tetap ada. Dasar itu tentu saja Pancasila.

Kembali ke Pancasila

Pancasila adalah dasar etis bangsa Indonesia karena komitmen pada Pancasila itulah yang mempersatukan komunitas-komunitas dari Sabang sampai Merauke. Pancasila bisa disebut rumusan nilai-nilai dasar, cita-cita dan norma-norma dasar etika politik bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah dasar di atasnya kita harus dan dapat menanggulangi tantangan-tantangan yang kita hadapi itu. Pancasila adalah yang harus menjadi acuan akhir segala kebijakan, jadi harus betul-betul dihayati. Pancasila, itu berarti baik masing-masing sila maupun rohnya.

Roh Pancasila adalah persatuan segenap bangsa tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, baik dalam hal agama maupun dalam hal kesukuan, budaya dan kedudukan sosial dan ekonomis. Itu kelihatan dari kenyataan bahwa Pancasila justru lahir sebagai pemecahan sebuah masalah dasar—sebagaimana yang pertama kali dicetuskan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945—yaitu masalah apakah Indonesia mau dijadikan negara agama atau negara nasionalis-sekuler. Jawaban yang diberikan Sukarno dan yang akhirnya mendapat bentuk definitif dalam pembukaan Undang-undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak ada diskriminasi di antara kita. Pancasila itu

kesepakatan bahwa tak ada warga bangsa Indonesia yang didiskriminasi atas dasar keyakinan religius maupun kekhasan budayanya. Konsensus itu menjadi mungkin karena lima nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, yang terungkap dalam lima sila Pancasila, dimiliki bersama. Konsensus itu dasar mengapa keanekaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke mau bersama dan bisa merupakan satu bangsa.

Untuk memahami masing-masing sila dengan tepat perlu kita perhatikan bahwa negara Indonesia yang mau didirikan oleh para *founding fathers* bukan semacam Majapahit atau Kasultanan, melainkan suatu negara modern yang menganbil kedudukan di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu Pancasila hanya dimengerti betul, dan hanya „mempunyai gigi“ apabila tidak dikebiri dengan ditafsirkan sekedar sebagai nilai-nilai yang sejak ribuan tahun dihayati di Nusantara. Pancasila bukan hanya masa lampau. Pancasila memang berakar dalam nilai-nilai yang dimiliki masyarakat-masyarakat Nusantara sejak ratusan dan barangkali ribuan tahun, akan tetapi Pancasila hanya mempunyai gigi kalau dipahami sebagai etika politik bagi kita sekarang, di abad ke-21, di dunia pasca-tradisional. Kalau kita membaca Pancasila sebagai etika politik bagi dunia sekarang, kita akan menemukan bahwa Pancasila mempunyai aktualitas tinggi serta memuat tonggak-tonggak etika politik yang di dunia pasca-tradisional sekarang dianggap paling fundamental dan mendasar.

Mari Kita Melihat Masing-masing Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan dengan maksud agar warga bangsa Indonesia dengan orientasi religius apa saja sepenuhnya diakui sebagai warga negara dan manusia. Rumus „Ketuhanan“ mengungkapkannya. Dengan sengaja tidak dipilih „Allah Yang Maha Esa“ atau „Tuhan Yang Mahaesa“, melainkan „Ketuhanan“. „Ketuhanan“ bisa menampung juga agama-agama dan keyakinan-keyakinan dengan paham realitas transenden berbeda dari agama-agama Abraham. Dalam bahasa kontemporer pengakuan itu tak lain adalah *pengakuan terhadap kebebasan beragama*. Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan bahwa di Indonesia orang bebas mengikuti apa yang memang diyakini, dan tidak ada keyakinan religius yang berhak mencampuri atau mendiktatori keyakinan orang maupun komunitas lain. Padahal kebebasan beragama adalah

Dasar paling pertama dan paling dasar etika politik modern, implikasi dalam *Perjanjian Perdamaian Westfalia* (1648) yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Karena itu sudah jelas bahwa pembatasan kebebasan beragama dan beribadat pada sejumlah "agama yang diakui" adalah tidak etis dan bertentangan dengan Pancasila. Memantapkan kembali harkat moral bangsa Indonesia menuntut agar kebebasan semua komunitas berkeyakinan religius dilindungi oleh negara melawan segala fanatisme dan totalitarisme yang merasa berhak menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diyakini orang di hadapan Tuhan.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menuntut agar segala perpolitikan Indonesia harus manusiawi, harus adil dan harus beradab. Beradab memuat penghormatan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan bukan cara suatu masyarakat yang beradab memecahkan konflik-konfliknya. Masyarakat, negara, aparat diharapkan membawa diri secara beradab. Secara positif pengakuan kemanusiaan memuat pengakuan martabat setiap orang sebagai manusia. Pengakuan itu dalam etika politik pasca-tradisional menjadi nyata dan operasional dalam pengakuan dan jaminan terhadap *hak-hak asasi manusia*. Jadi sila kedua Pancasila menuntut hormat tanpa syarat terhadap hak-hak asasi manusia.

Bahwa sampai hari ini masih ada suara-suara yang mau menghapus kembali hak-hak asasi sebagai hasil revolusi 1998 dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kita, itu amat mengkhawatirkan. Lupakan mereka akan kejahatan melawan kemanusiaan, pembunuhan, penahanan tanpa proses, penyiksaan dll. yang sudah disebutkan pada awal tulisan itu? Masih mempersoalkan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar kita menimbulkan pertanyaan tentang sikap *bona fide* mereka yang bersangkutan. Kita dapat juga mengerti mengapa alm. Profesor Nikolaus Drijarkara menganggap sila kedua sebagai inti Pancasila: alasannya sederhana. Menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kondisi apa pun tidak pernah salah. Sedangkan empat sila lain hanya berharkat etis apabila sesuai dengan sila kedua ini. Beragama secara tak manusiawi, tak adil dan tak beradab tidak bermutu, cinta pada bangsa dan negara harus sesuai dengan harkat kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi pun yang bertentangan dengan sila kedua merosot menjadi kediktatoran mayoritas dan keadilan sosial tanpa kemanusiaan yang beradab menjadi kendaraan kebencian ideologis.

Persatuan Indonesia bukan pertama-tama prinsip etika politik, melainkan penegasan bahwa bangsa Indonesia ditata dalam bentuk negara teritorial kebangsaan, yaitu dalam Republik Indonesia. Tetapi sebagai itu sila ketiga mengimplikasikan bahwa warga negara Indonesia mencintai bangsa dan negaranya dan bersedia berkorban baginya. Cinta pada bangsa adalah tanda bahwa warga berjiwa Indonesia. Dan sebaliknya, apabila ada kelompok atau komunitas yang menolak hormat dan cinta pada bangsa dan negara, maka hal itu amat meragukan dan biasanya berdasarkan ekstremisme ideologis yang juga buta terhadap tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan tentunya hanya bisa berarti satu: demokrasi! Demokrasi, bersama kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia adalah prinsip dasar etika politik pasca-tradisional. 86 tahun lalu Mohamad Hatta sudah menegaskan bahwa Indonesia merdeka harus menjadi demokrasi. Sesudah puluhan tahun rezim-rezim otoriter sejak tahun 1998 terwujud konsensus hampir segala pihak dalam masyarakat Indonesia bahwa Indonesia betul-betul harus menjadi negara dan masyarakat demokratis. Adalah sangat konsekuen bahwa MPR pilihan bebas rakyat Indonesia mengadakan amandemen-amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 yang bermaksud menjamin bahwa Indonesia tetap demokratis (hal mana tidak berarti bahwa demokrasi kita sekarang tidak masih dapat, bahkan barangkali malah perlu mengalami perbaikan-perbaikan lagi). Kita jangan kembali ke suatu situasi di mana sebuah elit neo-feodal-oligarkis merasa berhak menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat. Tentu rakyat, masing-masing dengan suaranya sendiri, menentukan apa yang dikeluhkannya.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - yang masih jauh sekali dari menjadi kenyataan—merupakan cita-cita paling penting para *founding fathers*—bersama dengan kemerdekaan. Keadilan sosial adalah tuntutan *solidaritas* antara yang sudah berada dan yang belum sebagai kewajiban dasar suatu bangsa. Bangsa merupakan komunitas yang solider. Solidaritas dalam keluarga besar, dalam desa, dalam kelompok merupakan nilai yang sekarang pun masih kuat dihayati dalam masyarakat. Tidak bisa diterima bahwa sebagian bangsa maju terus dan menikmati hasil buah pembangunan sedangkan lebih dari 100 juta saudara dan saudari sebangsa hanya nonton saja. Hanya kalau segenap warga bangsa merasa

diperlakukan dengan adil ketegangan-ketegangan yang sering mencuat dalam konflik berkekerasan akan berkurang.

Keadilan sosial berarti menciptakan struktur dan situasi yang memungkinkan segenap warga hidup wajar sebagai manusia. Perlu diperhatikan bahwa keadilan sosial merupakan unsur penting dalam hak-hak asasi manusia. Kebebasan-kebebasan asasi hanya berstatus etis kalau diwujudkan suatu masyarakat bersolidaritas, karena hanya dalam masyarakat bersolidaritas semua warga dapat menikmati kebebasan-kebebasan itu. Harkat etis perpolitikan di Indonesia menuntut bahwa penciptaan kondisi-kondisi yang memungkinkan segenap warga hidup secara wajar dijadikan prioritas pertama perpolitikan kita.

Kita Tak Boleh Mundur Lagi

Perpolitikan kita terancam pembusukan moral. Sudah waktunya kita menempatkan perpolitikan Indonesia kembali ke landasan yang menjamin harkat etisnya. Harkat etisnya berarti: Perpolitikan kita menunjang manusia Indonesia dalam keutuhan martabatnya. Di satu pihak kita harus ke luar dari korupsi mental dan nyata yang merajalela dalam kelas politik kita. Kita memerlukan politisi yang dari kedalaman hati bertekad memakai kedudukan mereka untuk memajukan bangsa Indonesia. Tak perlu para politisi kita adalah orang suci. Tetapi mereka harus merasakan bara di hati yang mendorong mereka untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

Perpolitikan Indonesia hanyalah dapat mengklaim diri bersifat etis, jadi berharkat moral, apabila berdasarkan cinta dan komitmen pada keselamatan, kesejahteraan, kemajuan dan martabat bangsa. Dan itu berarti: Negara kita harus semakin sesuai dengan cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Pancasila bukan sejumlah nasehat untuk moralitas pribadi, tenggang rasa dan lain sebagainya. Itu pernah menjadi fokus Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dalam kenyataannya mengebiri Pancasila karena meluputkan penguasa dari tuntutan-tuntutan kerasnya. Setia pada Pancasila berarti: Kita menjamin bahwa tidak ada warga satu pun dan komunitas satu pun yang merasa tertekan karena kepercayaan dan keyakinan religiusnya, hak-hak asasi manusia tidak ditawar-tawar lagi, melainkan dijamin tanpa kecuali, pemerintahan Indonesia nyata-nyata demokratis, jadi nyata-nyata rakyat

dan warga rakyat memiliki kebebasan-kebebasan demokratis dan dapat menentukan siapa yang memerintahnya serta memilih bebas siapa yang mewakilinya, dan apabila perpolitikan kita—kebijakan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang pendidikan dan lain-lain—sepenuhnya terarah pada pencapaian keadilan sosial menjadikan nyata solidaritas di mana semua mereka yang masih kurang sejahtera, kurang bebas, kurang berdaya, merasa didukung dan diberdayakan oleh saudara-saudarinya.

